

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam UU RI No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjadikan bergesernya pola pengelolaan organisasi pendidikan seperti sekolah, menjadi ke arah yang lebih independen sesuai dengan kebutuhan. Seperti disebutkan dalam Bab IV Pasal 7 poin 1, bahwa : Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Lebih lanjut dalam pasal 11 poin 2, menyebutkan bahwa : Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja.

Kebijakan otonomi daerah memindahkan sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara seimbang. Hal ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga munculnya istilah desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan.

Desentralisasi pendidikan tersebut juga memunculkan inisiatif dalam manajemen mandiri yang menyangkut peningkatan diri sekolah. Manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai istilah yang lahir dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah suatu upaya mewadahi tuntutan masyarakat setempat serta pencapaian kompetensi masyarakat dalam hal ilmu dan teknologi. MBS menuntut dukungan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat. Kewenangan dalam MBS itu dialihkan dan berada sepenuhnya dalam diri sekolah.

Pengelolaannya sekolah secara desentralistik kini telah memberikan keleluasaan pengembangan lembaganya secara mandiri dan kreatif, salah satunya berkenaan dengan kegiatan evaluasi diri sekolah (School Self Evaluation) atau tercakup dalam pengawasan pembelajaran secara mandiri.

Disebutkan dalam Permendiknas RI No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, disebutkan dalam standar pengawasan dan evaluasi mengenai evaluasi diri, sebagai berikut :

1. Sekolah/ Madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/ madrasah.
2. Sekolah/ madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan standar nasional pendidikan.
3. Sekolah/ madrasah melaksanakan :
 - a. Evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik.
 - b. Evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/ madrasah.
4. Evaluasi diri sekolah/ madrasah dilakukan secara periodik berdasar pada data dan informasi yang sah.

Kepala sekolah dalam hal ini sebagai pengawas internal lingkungan sekolah memiliki kewenangan untuk menciptakan metode pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga yang dipimpinnya. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen perlu dilakukan sebagai kegiatan penjaminan tujuan instruksional maupun tujuan sekolah dapat tercapai dengan lancar tanpa melalui penyelewengan. Termasuk didalamnya penjaminan kinerja guru dalam tugas pembelajaran.

Pengawasan pada umumnya dilakukan dengan melalui tahapan : penetapan standar dasar untuk pengawasan, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menetapkan kesenjangan, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan dengan tindakan korektif.

Dijelaskan dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Bab IV Standar Proses Pasal 23 disebutkan bahwa : Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Berkenaan dengan kenyataan pengawasan yang ada disekolah. Dalam Tesis Titi Winiarti (2002:34) diungkapkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ; Pengawas dan kepala sekolah diketahui belum optimal memahami peranannya sebagai supervisor pengajaran, melaksanakan supervisi pengajaran melalui prosedur pelaksanaan supervisi pengajaran yang telah ditetapkan yaitu perencanaan/persiapan, pelaksanaan dan evaluasi atau tindak lanjut, disamping itu pula masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi pengawas dan kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi. Kemampuan guru

pun baik dilihat dari kemampuan proposional, kemampuan pribadi maupun kemampuan sosial belum optimal.

Proses pengawasan sekolah pada umumnya dilaksanakan secara melekat oleh pimpinan. Melekat diartikan bahwa hal itu dapat dilakukan tanpa menggunakan alokasi dana khusus karena pengawasan melekat ini otomatis melekat pada tugas yang harus dilaksanakan oleh pimpinan.

Pengawasan menjadi suatu tanggung jawab yang membutuhkan peran aktif pimpinan, pada umumnya dilaksanakan dengan cara berkunjung secara langsung kedalam kegiatan pembelajaran sewaktu-waktu. Pengawasan juga mencakup kegiatan memberikan pengarahan, memeriksa laporan, memberikan perhatian kepada guru serta menunjukkan keteladanan. Semua upaya itu adalah guna meningkatkan kinerja guru dalam rangka pencapaian tujuan sekolah.

Tugas yang menuntut peran aktif secara langsung ini, memang efisien dalam hal alokasi biaya namun cenderung tidak efisien dalam hal alokasi waktu meskipun hanya dilakukan sewaktu-waktu. Kepala sekolah berperan sebagai pengawas intern juga sekaligus sebagai manajer yang tentunya memiliki tugas lain yang menuntut peran aktifnya, juga melihat bahwa tidak sedikitnya guru yang harus mendapat perhatian atau pengawasan dalam menjalankan tugasnya.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi yang strategis dalam kegiatan pendidikan disekolah serta dituntut memiliki kompetensi yang diterapkan secara baik dalam tugas mengajarnya. Motivasi mengajar guru adalah sebuah penggerak yang ada didalam diri guru untuk melakukan tugas

pembelajarannya terhadap siswa. Ukuran motivasi atau penggerak tersebut menentukan kapasitas kegiatan mengajar yang dilakukannya.

Menjadi tanggung jawab bagi sekolah untuk selalu mengusahakan pengawasan yang efektif agar terciptanya motivasi yang baik pada diri guru. Guru dalam melakukan tugasnya tentu memiliki kecenderungan tidak bersemangat atau tidak melakukan kinerja terbaiknya, pengawasan dimaksudkan untuk memastikan kinerja terbaik agar selalu dilakukan guru. Namun hal ini tidak mudah karena pimpinan tentu tidak dapat selalu memastikan bahwa jadwal kunjungannya dilakukan pada waktu yang tepat saat guru membutuhkan pengawasan karena kinerjanya tidak optimal..

Pengawasan yang dilakukan melalui kunjungan langsung dirasa kurang efektif dan efisien dalam hal waktu dan tenaga. Maka seperti telah disebutkan bahwa pergeseran pola manajemen pendidikan kearah MBS adalah salah satunya dimaksudkan untuk pencapaian kompetensi masyarakat dalam hal ilmu dan teknologi. Pelaksanaan MBS dalam hal pengawasan intern sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah membutuhkan modifikasi.

Pemanfaatan perangkat teknologi dalam pengawasan proses pembelajaran dapat dilakukan guna memperbaiki kekurangan tersebut. CCTV atau *Closed Circuit Television Video* dapat menjadi salah satu produk teknologi yang diadopsi untuk menunjang kegiatan pengawasan internal sekolah. SMPN 14 Bandung menjadi salah satu lembaga yang telah memanfaatkan CCTV dilingkungan sekolah sebagai perangkat pengawasan intern sekolah secara mandiri.

Melalui permasalahan tersebut, maka melalui penelitian ini hendak dikaji dan dipaparkan perihal adakah pengawasan yang ditunjang oleh perangkat CCTV memiliki hubungan dengan kondisi motivasi kerja guru. Dimana tentunya motivasi kerja guru adalah menjadi tanggungjawab sekolah yang harus dikondisikan secara baik salah satunya mungkin melalui pengawasan yang ditunjang oleh CCTV karena pemanfaatan teknologi dalam pendidikan diyakini mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

SMP N 14 Bandung sebagai sebuah lembaga pendidikan yang didalam praktik pendidikannya tidak melupakan pentingnya aspek pengawasan pendidikan, saat ini telah memanfaatkan perangkat CCTV didalam lingkungan sekolahnya sebagai media pengawasan intern sekolah.

CCTV adalah penggunaan video kamera yang mentransmisi penyiaran kepada lingkup perangkat monitor tertentu yang sifatnya spesifik dan terbatas. Dalam artian bahwa penyiaran CCTV tidak secara bebas dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor yang telah disediakan.

Pengalokasian dana atau penyediaan media dalam pengawasan yang ditunjang dengan perangkat CCTV, diharapkan dapat mengoptimalkan proses pengawasan diri sekolah guna menciptakan kapasitas motivasi yang baik pada diri guru, terutama di SMP N 14 Bandung sehingga tercipta tujuan pendidikan kearah yang lebih baik.

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti ingin melihat **Hubungan Antara Pengawasan Proses Pembelajaran Melalui CCTV Dengan Motivasi Kerja Guru.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak diajukan dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Hubungan Antara Pengawasan Proses Pembelajaran Melalui CCTV Dengan Motivasi Kerja Guru”. Bertolak dari pokok tersebut, berikut ini penjabaran masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana persepsi guru mengenai pengawasan proses pembelajaran melalui CCTV di SMP N 14 Bandung?
2. Bagaimana motivasi kerja guru di SMP N 14 Bandung?
3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi guru tentang pengawasan proses pembelajaran melalui CCTV dengan motivasi kerjanya?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai arah bagi kegiatan penelitian nantinya, berikut ini tujuan penelitian yang dijabarkan menjadi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi guru tentang pengawasan melalui CCTV di SMPN 14 Bandung.
2. Untuk mengetahui motivasi kerja guru di SMP N 14 Bandung.
3. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi guru tentang pengawasan proses pembelajaran melalui CCTV dengan motivasi kerjanya.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berkenaan dengan dunia pendidikan khususnya terkait dengan bidang garapan teknologi pendidikan. Adapun manfaat secara teoritis dan secara praktisnya adalah :

1. Teoritis

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pendidikan terutama berkenaan dengan upaya pembentukan kapasitas motivasi kerja yang baik bagi guru dalam kegiatan pendidikan dilingkungan sekolah. Serta menjadi masukan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pengawasan di lingkungan sekolah, terutama mengenai hubungan pengawasan proses pembelajaran melalui CCTV dengan motivasi kerja guru.

2. Praktis

Bagi sekolah, yakni SMPN 14 Bandung diharapkan agar hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam upaya mewujudkan motivasi kerja dan kegiatan pembelajaran yang optimal melalui variabel-variabel yang berhubungan dengannya, terutama variabel pengawasan melalui CCTV di sekolah.

Bagi peneliti, kegiatan penelitian agar menjadi proses pembelajaran yang bermakna serta sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman, sehingga dapat mengoptimisasikan teori yang menjadi dasar penelitian, untuk kemudian di analisis fakta dan data yang ada guna memperoleh kesimpulan yang objektif, ilmiah juga bermanfaat.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami arah kajian penelitian secara lebih lanjut perlu dijelaskan mengenai definisi operasional variabel penelitian.

1. Persepsi Guru tentang Pengawasan Proses Pembelajaran Melalui CCTV

Persepsi guru tentang pengawasan pembelajaran melalui CCTV dalam penelitian ini adalah : proses kognitif yang terjadi melalui indera seorang guru terhadap pengalaman atau lingkungan pembelajaran yang didalamnya terdapat kegiatan pengawasan dengan CCTV sebagai alat bantu pengawasan, dimana dirinya juga menjadi salah satu objek pengamatan. Proses kognitif ini kemudian memunculkan kesimpulan mengenai pengawasan pembelajaran melalui CCTV.

2. Motivasi Kerja Guru

Motivasi kerja guru yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : dorongan yang menggerakkan guru untuk melakukan suatu kerja dalam proses pembelajaran agar perilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena adanya pengawasan dengan CCTV, berupa skor hasil pengukuran motivasi yang diperoleh melalui pengisian angket sebagai instrumen penelitian.

F. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik (Arikunto, 2006:65), yang menjadi asumsi dalam penelitian ini adalah :

- a. Guru sebagai tenaga profesional pendidikan merupakan suatu komponen penting dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah.
- b. Persepsi sebagai suatu proses aktif dalam diri individu mengenai suatu objek dan dapat mempengaruhi perilakunya dalam kegiatan yang tengah dijalani.
- c. Menjalankan fungsi pengawasan dalam sekolah bertujuan untuk memastikan ketercapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Salah satu penunjang ketercapaian tujuan sekolah yang efektif dan efisien adalah adanya motivasi kerja yang baik dari guru.
- d. Manajemen berbasis sekolah memberi kesempatan kepada sekolah untuk melakukan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
- e. CCTV menjadi salah satu produk teknologi yang bermanfaat dan bisa dimasukan ketengah-tengah lingkungan pendidikan serta diadopsi untuk menjadi alat bantu pengawasan aktivitas pendidikan disekolah.

2. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan teoritik yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui analisis terhadap bukti-bukti empirik (Riduwan, 2007:115). Hipotesis dalam penelitian ini : **Terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan proses pembelajaran melalui CCTV dengan motivasi kerja guru**". Adapun setting hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$H_a : r_{XY} \neq 0$$

$$H_0 : r_{XY} = 0$$

H_a : Terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan proses pembelajaran melalui CCTV dengan motivasi kerja guru.

H_0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan proses pembelajaran melalui CCTV dengan motivasi kerja guru.